
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan kerja Perangkat Daerah, Renja BKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan bagi acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.
3. Renstra K/L dan Renstra Kebijakan yang terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan untuk Provinsi Aceh dialokasikan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dan Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan tersebut dengan menyiapkan semua kelengkapan baik administrasi maupun sumber daya aparatur yang ditugaskan secara khusus untuk menangani hal ini.
4. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat diwujudkan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan Renja hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur Penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 137 ayat (1) antara lain:

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh (BKA) Tahun Anggaran 2021 disusun melalui proses koordinasi dengan berbagai *stakeholder* serta mempedomani program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pada BKA Tahun 2017 – 2022 yang merupakan hasil sinergi dan implementasi program yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja

Pemerintah Aceh(RKPA) Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017 – 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021 berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 2015 tentang

-
- Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh; dan

-
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 050/1317/2019 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman dan panduan dalam mengevaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2020, dan perencanaan program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Aceh pada Tahun Anggaran 2021.

Sedang tujuan disusunnya rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan atau menjabarkan implementasi program dan kegiatan yang ada di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021 unit kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh (BKA) tahun 2020 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan Latar Belakang pengertian ringkas mengenai Renja BKA Tahun 2021 serta proses alur pembuatan Renja BKA Tahun 2021, Landasan Hukum pembuatan Renja, Maksud dan Tujuan Renja serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2020

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja BKATahun 2019 dan capaian Renstra BKA, Analisis kinerja pelayanan BKA, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKA, Review terhadap rancangan awal RKPA, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja BKA, serta Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kerangka pendanaan BKA Tahun 2020 serta Rencana Belanja SKPA berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022.

Bab V Penutup

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan dokumenRenstra Badan Kepegawaian Aceh 2017-2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi yang diemban oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMA tahun 2017-2022.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKA TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKA Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKA

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kepegawaian Aceh ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan unit kerja Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BKA, serta menginventarisir semua hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2019 mencapai **105,68%** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.811.334.318.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BKA Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKA, meliputi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019, Realisasi Target Kinerja Hasil Pelaksanaan Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3, Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2), Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1), Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan.

2.1.1 Realisasi yang tidak Memenuhi Target

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2019 yang tidak memenuhi target mencapai **15,84%**, adapun kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu :

Kegiatan	Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019
Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	100%	58,04%
Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional	100%	28,24%
Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas	100%	61%
Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI	100%	90%
Pelaksanaan Bapertarum/Tapera bagi PNS	100%	50%
Pelaksanaan assesment untuk SDM Aparatur	100%	20%
Penataan Sistim administrasi Penetapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)	100%	55,1%
Pelaksanaan Pemetaan, Perencanaan, Pengusulan Formasi, Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD	100%	30%
Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah Aceh	20%	0%

2.1.2 Realisasi yang Mencapai Target

Realisasi capaian akhir pelaksanaan Program dan Kegiatan BKA pada Tahun 2019 mencapai **89,85% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 34.811.334.318.** adapun kegiatan yang memenuhi target yaitu :

Kegiatan	Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100%
Penyediaan alat tulis kantor	100%	100%
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%
Penyediaan makanan dan minuman	100%	100%

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
Penyediaan bahan perkantoran	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	100%
Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	100%	100%
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum	100%	100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kator	100%	100%
Kegiatan pembinaan kelembagaan	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%
Pembinaan disiplin PNS	100%	100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%
Rapat Koordinasi di bidang kepegawaian	100%	100%
Pelaksanaan Pemindahan Tugas ASN	100%	100%
Pelaksanaan Cuti, Taspen dan Askes	100%	100%
Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	100%	100%
Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian	100%	100%
Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN	100%	100%
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100%
Pelaksanaan sumpah/Janji PNS	100%	100%
Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS	100%	100%
Pembinaan, Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%
Pembinaan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an bagi Anggota KORPRI	100%	100%
Pembinaan Lembaga KORPRI	100%	100%
Pembinaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI	100%	100%

Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas Anggota KORPRI	100%	100%
Pengelolaan, penataan dossier kepegawaian bagi ASN	100%	100%
Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi	100%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	100%	100%

2.1.3 Realisasi yang Melebihi Target

Realisasi capaian akhir Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2019 ada yang melebihi target yang ditetapkan/direncanakan yaitu pada kegiatan :

Kegiatan	Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019
Penataan Sistem administrasi Penetapan Pensiun Pangkat Otomatis (PPO)	100%	332,5%
Proses Penyelesaian dan Penetapan Status Kepegawaian	100%	381%
Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	395,33%

2.1.4 Faktor Penyebab tidak Tercapainya Target Program/Kegiatan

Uraian faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2019 yaitu :

1. Pelaksanaan Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar ujian dinas menurun dari tahun sebelumnya.

2. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional

Besaran target yang ingin dicapai dinilai terlalu besar jika dilihat realisasinya.

3. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar menurun dari tahun sebelumnya dan passing grade yang terlalu besar.

4. Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar menurun dari tahun sebelumnya.

5. Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pengalihan Dana dari Bapertarum ke Tapera sehingga lambatnya pemberian data dari Pegawai ASN untuk diproses lebih lanjut.

6. Penataan Sistem administrasi Penetapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

Jumlah berkas kenaikan pangkat otomatis tidak mencapai target yang ingin dicapai.

7. Pembinaan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI

Dari Target yang ingin dicapai, kegiatan ini tidak terealisasi mencapai target, dikarenakan jumlah pendaftar menurun dari tahun sebelumnya.

8. Pelaksanaan assesment untuk SDM Aparatur

Kegiatan Assesment tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pelaksanaan pengiriman calon Assesor sebanyak 4 orang belum dapat dilaksanakan dikarenakan, untuk mengikuti diklat assesor harus terlebih dahulu melengkapi portofolio dan mengikuti diklat penunjang lainnya.

9. Pelaksanaan Pemetaan, Perencanaan, Pengusulan Formasi, Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD

Kegiatan Seleksi CPNSD pada tahun 2019 dapat terealisasi hingga tahap

pertama namun dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga pelaksanaan tertunda dan dilaksanakan pada awal 2020 dengan anggaran Tahun 2020.

10. Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah Aceh

Kegiatan ini telah dilaksanakan oleh pihak BKN, sehingga BKA hanya menunggu laporan hasil kegiatannya.

2.1.5 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Tidak terdapatnya/ditemukannya implikasi terhadap capaian program Renstra BKA.

2.1.6 Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat tercapainya target yaitu target yang diinginkan terlalu besar dibandingkan dengan realisasinya, oleh karena itu kedepannya agar tercapai target dapat diperkecil presentase capaian targetnya. Faktor selanjutnya yaitu anggaran yang diberikan tidak sesuai target, dengan demikian untuk mengatasi masalah tersebut, anggaran yang diberikan harus diselaraskan agar target tercapai.

2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2020 Provinsi Aceh (Tabel T-C.29) terdapat pada **Lampiran.**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Aceh

Analisis kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Aceh berupa pengkajian terhadap tingkat capaian kinerja pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Aceh dengan membandingkan dengan kinerja dan rencana kinerja dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.1 Kajian terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator

Untuk menganalisis capaian kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Aceh digunakan beberapa indikator pembanding antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Badan Kepegawaian Aceh dan/atau berdasarkan atas hasil analisis dengan mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Hasil analisis Kinerja Pelayanan BKA pada Tahun 2019 ada Kegiatan yang tidak dapat terealisasikan yaitu, Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment Untuk SDM Aparatur dan Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS.

Hal tersebut di atas membuat realisasi capaian kegiatan tidak terpenuhi, kegiatan Assesment tidak dapat dilaksanakan disebabkan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan target serta pada kegiatan Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS tidak dapat dilaksanakan karena kendala penyelesaian proses pengalihan dana Bapertarum ke Tapera.

2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30)

Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (T-C.30) terdapat pada **Lampiran**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Aceh

2.3.1 Koordinasi dan Sinergi Program BKA dengan Perangkat Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Dalam RPJMN 2015-2020 dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan NAWA CITA tersebut, Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang kedua yaitu

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Badan Kepegawaian Aceh didirikan pada tahun 2017 setelah dilakukan pemisahan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh menjadi dua instansi yaitu Badan Kepegawaian Aceh dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dengan tugas utamanya membantu Gubernur Aceh dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang manajemen kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Aceh dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan kepegawaian;
2. Lemahnya sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah yang berbasis e-kinerja sesuai Standar Pelayanan Minimal;
3. Belum optimalnya penempatan pimpinan OPD yang berkualitas melalui *Fit and Proper Test*;
4. Lemahnya kualitas SDM aparatur Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan bidang keahlian; dan
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan kebijakan teknis kepegawaian serta evaluasi;
4. pelayanan administrasi kepegawaian;
5. penyiapan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
6. penyiapan formasi dan pengadaan pegawai;
7. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Aceh dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural dilingkungan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
8. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
9. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
10. penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi pendidikan tenaga kader;
11. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai;
12. penyiapan dan penetapan penggajian dan pensiun pegawai;
13. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
14. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;

-
15. penetapan tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten/kota;
 16. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;
 17. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
 18. pelaksanaan pengembangan tenaga kader;
 19. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepegawaian;
 20. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 21. pembinaan UPTB; dan
 22. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, susunan organisasi Badan Kepegawaian Aceh terdiri dari :

1. Kepala Badan;

Kepala Badan Kepegawaian Aceh membawahi Sekretariat dan seluruh Bidang dan sub Bidang, termasuk Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan yang diperbantukan.;

2. Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub bagian, yaitu;

- 1) Sub bagian Program dan Pelaporan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;

Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu;

- 1) Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pengkaderan;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Jabatan Pimpinan, Administrasi dan Fungsional;
- 3) Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja.

4. Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) sub bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I;
- 2) Sub Bidang Kepangkatan Wilayah II;
- 3) Sub Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun.

5. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan

- 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
- 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

6. Bidang Informasi Kepegawaian

- 1) Sub Bidang Sistem dan Teknologi Informasi;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian;
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Arsip Kepegawaian.

7. Bidang Pelayanan Penunjang KORPRI

- 2) Sub Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
- 3) Sub Bidang Mental dan Rohani

4) Sub Bidang Fasilitasi dan Bantuan Hukum.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Kelompok Jabatan yang Diperbantukan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Aceh dijabarkan dengan menganalisis kekuatan yang dimiliki yang berdampak positif pada organisasi. Kekuatan seperti itu perlu ditangani dalam rangka mendukung Badan Kepegawaian Aceh dalam mewujudkan visi dan misi yang merupakan kekuatan internal dan eksternal organisasi. Harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal perlu dianalisa lebih lanjut untuk memberikan informasi tambahan pada pengembangan tugas-tugas Badan Kepegawaian Aceh saat ini dan masa mendatang, terutama dalam kaitannya dengan upaya mengakomodasi terhadap kebutuhan organisasi pemerintah yang terus berkembang sesuai tuntutan era globalisasi dan perkembangan informasi yang semakin kompleks.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional

Pencapaian Visi dan Misi Gubernur Aceh dengan Capaian Program Nasional sudah selaras guna mencapai tujuan dan sasaran Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Badan Kepegawaian Aceh

Yang menjadi tantangan Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat;
- b. Distribusi aparatur tidak merata, baik secara kuantitas maupun kualitas;
- c. Penempatan aparatur tidak sesuai dengan keahlian;

-
- d. Sumber daya aparatur masih lemah yang tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Tatacara dan mekanisme pemberian penghargaan belum dilakukan secara terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas;
 - f. Pemberian sanksi belum memberikan efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus belum menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya;
 - g. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi ASN mulai dari proses rekrutmen hingga proses pensiun;
 - h. Terjadinya mutasi yang belum mengacu kepada pola dan jenjang karir;
 - i. Belum tersedianya standar kompetensi untuk masing jabatan;
 - j. Era globalisasi dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, menuntut sistem pelayanan kepegawaian harus mengikuti perubahan/perkembangan.

Yang menjadi Peluang Badan Kepegawaian Aceh dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Otonomi dalam penyelenggaraan manajemen SDM Aparatur Pemerintah Aceh;
- b. Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir pegawai;
- c. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan;

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting

Dari tantangan di atas maka Badan Kepegawaian Aceh meningkatkan kualitas Pegawai dan meningkatkan target capaian pada tahun berjalan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kepegawaian Aceh dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepegawaian bagi ASN di Aceh.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana/Target Kinerja BKA juga harus sejalan dengan Renstra BKA dan pencapaian tingkat kinerja utama yang dicapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dengan arahan Kepala Daerah dalam kaitannya dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPA berdasarkan rancangan awal RKPA.

Review terhadap rancangan awal RKPA, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPA yang bersangkutan. Temuan kegiatan yang tidak sesuai yaitu kegiatan Assesment tidak dapat dilaksanakan disebabkan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan target serta kegiatan Bapertarum bagi PNS tidak dapat terlaksana karena kendala dalam penyelesaian fasilitas umum.

2.4.1 Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (T-C.31)

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (T-C.31) dapat dilihat pada **Lampiran**.

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak dapat diuraikan dikarenakan, Badan Kepegawaian Aceh bukan merupakan instansi yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, BKA tidak merealisasikan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud yakni penelaahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2020 dengan tugas, pokok dan fungsi BKA. Dalam RPJMN 2015-2020 dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan NAWA CITA tersebut, Badan Kepegawaian Aceh melaksanakan upaya untuk mewujudkan prioritas yang kedua yaitu Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Aceh

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kepegawaian Aceh dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kepegawaian bagi PNS di Aceh.

Tujuan disusunnya rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan atau menjabarkan implementasi program / kegiatan yang ada di rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021 unit kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021. Sedang Sasaran Rencana Kerja BKA Tahun 2021 dikaitkan dengan Renstra BKA 2017 - 2022 adalah:

- 1) Meningkatnya kesesuaian kompetensi pegawai dengan kualifikasi jabatan dalam kaderisasi, pengangkatan, penempatan dan pengembangan pegawai;
- 2) Meningkatnya kesejahteraan Pegawai melalui pemberian pelayanan yang maksimal kepada pegawai;
- 3) Teraplikasikannya *software reward and punishment system*;
- 4) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah;
- 5) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran ketentuan disiplin pegawai ASN;
- 6) Meningkatnya solidaritas, soliditas dan profesionalisme Pegawai ASN; dan
- 7) Tersedianya Data Kepegawaian Pemerintah Aceh yang *up to date*..

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh akan melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan Pemerintah Aceh berhasil mewujudkan target-target pembangunan yang signifikan berdampak pada keberhasilan pembangunan Aceh berkat komitmen terhadap reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Dengan itu Badan Kepegawaian Aceh ingin meningkatkan fungsi dan peran aparatur untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam bidang pelayanan demi terwujudnya Aceh yang sejahtera. Oleh karena itu, BKA membuat program dan kegiatan dengan berdasarkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalismedan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

-
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
 6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
 7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
 8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dari Visi-Misi di atas, Badan Kepegawaian Aceh menerapkan prioritas pada Misi yang pertama dengan beberapa cara melalui penetapan kebijakan program. Penetapan kebijakan dimaksud sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan ditetapkan. Untuk itu Badan Kepegawaian Aceh telah menetapkan beberapa kebijakan yaitu:

1. Mensosialisasikan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, disiplin dan kesejahteraan pegawai;

-
3. Melaksanakan pemetaan jabatan, analisis beban kerja, analisis persyaratan jabatan, analisis kebutuhan SDM sesuai formasi dan rekrutmen pegawaiian sesuai kebutuhan;
 4. Melakukan penilaian kinerja, analisis kepangkatan, analisis proses dan prosedur mutasi dan analisis promosi jabatan SDM;
 5. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan tentang disiplin kerja aparatur pemerintah;
 6. Memberlakukan *Reward and punishment* terhadap kedisiplinan aparatur;
 7. Peningkatan hubungan sosial dan silaturahmi;
 8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan aparatur, Perlindungan hukum bagi aparatur dan Pengkajian sistem penggajian.

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Uraian Program secara garis besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
2. Program Kepegawaian Daerah.

Dari Program yang di atas, dibentuklah kegiatan – kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran proram sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- i. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- ii. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- iii. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

b. Admnistrasi Keuangan :

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- iii. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- iv. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- v. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- vi. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- vii. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Administrasi Umum :

- i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- iii. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- iv. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-
- v. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - vi. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - vii. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - viii. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - ix. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - xi. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - xii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - xiii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - xiv. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - xv. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - xvi. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - xvii. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - xviii. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - xix. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - xx. Pengadaan Mebeleur
 - xxi. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - xxii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - xxiii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - xxiv. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - xxv. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
 - xxvi. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- i. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

-
- ii. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - iii. Pengadaan Pakaian Korpri
 - iv. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

2. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengelolaan Data dan Informasi ASN :

- i. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
- ii. Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
- iii. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- iv. Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Administrasi Kepegawaian :

- i. Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
- ii. Penataan dan Mutasi Jabatan
- iii. Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan
- iv. Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
- v. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

c. Peningkatan Kapasitas ASN :

- i. Peningkatan Kapasitas ASN
- ii. Pengembangan Penilaian Kinerja ASN

iii. Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)

d. Pembinaan ASN :

- i. Pembinaan Disiplin ASN
- ii. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- iii. Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja yang digambarkan pada Kerangka Pendanaan BKA Tahun 2020 dapat dilihat pada **Lampiran**

Kerangka Pendanaan BKA sesuai dengan DPA dan Realisasi Fisik dan Keuangan pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.811.334.318. serta Pendanaan Badan Kepegawaian Aceh yang digambarkan pada Rencana Belanja BKA berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.

4.1 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKA Tahun 2021 dan Prakiraan Maju 2022 (Terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Aceh Tahun 2021 diharapkan semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan. Dan diharapkan pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mencapai visi dengan merealisasikan misi yang telah ditetapkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh.

Dengan tercapainya visi dan misi tersebut maka Badan Kepegawaian Aceh telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.

Banda Aceh, 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P.,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731223 199311 1 001

TABEL : T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2020
PROVINSI ACEH

BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN WAJIB									
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terselenggaranya pelayanan jasa surat menyurat	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kegiatan operasional kantor	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan dan keindahan kantor	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
011	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan dokumen	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan jasa jaminan keberadaan energi listrik	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya mobiler kantor	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	-
015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah tersedianya buku-buku bacaan dan referensi	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum PNS	100%	100%	11 Bulan	11 Bulan	100%	11 Bulan	11 Bulan	100%
018	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	80%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
022	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan terhadap publik	100%	95%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
026	Penyediaan bahan perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan kendaraan dinas	100%	-	2 Unit	2 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	16 Unit	16 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	100%
026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%
033	Pemeliharaan Rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
037	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
042	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rehab rumah/gedung kantor	100%	-	8 Paket	8 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
046	Penunjang dan pembinaan kelembagaan	Jumlah sosialisasi kegiatan Dharma Wanita	100%	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan pembinaan kelembagaan	Terbinanya kelembagaan di lingkungan kantor	100%	70%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	137 stell	137 stell	100%	150 stell	150 stell	100%
04	Program Fasilitas Pindah Purna Tugas									
003	Pemindahan tugas PNS	Jumlah SK Pindah PNS yang terselesaikan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kemampuan usaha anggota KORPRI purna tugas	100%	90%	-	-	-	-	-	-
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
004	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang mendapat SK kenaikan pangkat tepat waktu	-	86%	-	-	-	-	-	50%
009	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah kasus-kasus sengketa kepegawaian	-	85%	-	-	-	-	-	100%
015	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kab/kota yang dimonitoring	-	44%	-	-	-	-	-	100%
026	Pelaksanaan sumpah/Janji PNS	Jumlah PNS yg telah di sumpah	-	88%	-	-	-	-	-	100%
17	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur									
001	Pembinaan disiplin PNS	Jumlah buku peraturan yang tersedia	100%	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
002	Pelaksanaan Pemetaan, Perencanaan, Pengusulan Formasi, Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD/PNS	Terlaksananya Pemetaan, Perencanaan, Pengusulan Formasi, Rekrutmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD/PNS	50%	-	100%	30%	30%	100%	100%	50%
003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50%	-	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	90%
004	Pelaksanaan Ujian Dinas	Jumlah PNS yang menerima Sertifikat lulus ujian dinas	100%	100%	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Ujian dinas/ ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Terlaksananya Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	90%	-	2500 PNS	1451 PNS	58.04%	1550 PNS	1500 PNS	90%
005	Penataan Mutasi jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah Penempatan PNS sesuai kebutuhan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional	Terlaksananya Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional	70%	-	395 PNS	25 PNS	28.24%	70 PNS	70 PNS	70%
006	Rapat Koordinasi di bidang kepegawaian	Jumlah Presentase Kab/Kota yang mengikuti Rakor	100%	100%	77 ASN	77 ASN	100%	77 ASN	77 ASN	100%
007	Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas	Terlaksananya Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Tenaga Kader dan Ikatan Dinas	59%	-	100 Mahasiswa	61 Mahasiswa	61%	72 Mahasiswa	72 Mahasiswa	59%
008	Pelaksanaan Rekrutmen, Seleksi dan pengangkatan CPNSD	Jumlah CPNSD yang lulus	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
008	Pelaksanaan assesment untuk SDM Aparatur	Terlaksananya Assesment dan Computer Assisted Test Untuk ASN Pemerintah Aceh	60%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60%
009	Pelaksanaan Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN di lingkungan Pemerintah Aceh, Kab/Kota, Antar Provinsi dan Antar Lembaga/Kementerian	80%	-	2000 PNS	2000 PNS	100%	1580 PNS	1500 PNS	80%
010	Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon praja IPDN	Jumlah Calon Praja IPDN yang di rekrut	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
010	Pelaksanaan Cuti, Askes dan Taspen	Terlaksananya Administrasi Cuti, Askes dan Taspen	80%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80%
011	Pelaksanaan DP-3, Cuti, Taspen dan Askes	Jumlah PNS yang terselesaikannya DP-3, Cuti, Taspen dan Askes	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
011	Pelaksanaan Bapertarum / Tapera bagi PNS	Terlaksananya Administrasi Bapertarum/Tapera Bagi PNS	82%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	82%
012	Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	Jumlah SKPA yang memahami peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	100%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
013	Pembinaan KORPRI Provinsi Aceh	Terbinanya lembaga KORPRI Provinsi Aceh	90%	90%	-	-	-	-	-	90%
013	Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian	100%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
014	Pelaksanaan Manajemen Kinerja ASN	Terlaksananya Perencanaan, Pengukuran, Penilaian dan Pengendalian Kinerja ASN Pemerintah Aceh	70%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70%
015	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus sengketa kepegawaian	50%	-	-	-	-	-	-	50%
016	Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS	Jumlah PNS yg menerima Bapertarum	100%	0%	-	-	-	-	-	100%
016	Pelaksanaan sumpah/janji ASN	Jumlah PNS yang diambil sumpah/janji	350 orang	100%	400 PNS	399 PNS	100%	400 PNS	400 PNS	350 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
017	Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian bagi PNS	Terciptanya pengelolaan dosir kepegawaian	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
018	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Dapat mengakses seluruh data pegawai Pemerintah Aceh	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
018	Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS	Terlaksananya Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS	25%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%
019	Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ASN	Terlaksananya Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	100%	-	10.000 ASN	5.510 ASN	55.1%	10.000 ASN	10.000 ASN	100%
020	Penataan Sistim Administrasi Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) ASN	Terlaksananya Penetapan Pensiun ASN Tepat Waktu	100%	-	200 PNS	665 PNS	332.5%	200 PNS	200 PNS	100%
021	Proses Penyelesaian dan Penetapan Status Kepegawaian	Terlaksananya Penyelesaian dan Penetapan Status Kepegawaian ASN	100%	-	100 PNS	381 PNS	381%	100 PNS	100 PNS	100%
022	Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	80%	-	150 PNS	593 PNS	395.33%	150 PNS	150 PNS	80%
023	Pembinaan, pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Aceh	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Aceh	70%	-	100%	100%	100%	80%	75%	70%
024	Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah Aceh	Terhimpunnya data ASN Pemerintah Aceh yang berbasis talenta	70%	-	20%	0%	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70%
025	Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	Jumlah SKPA yang memahami peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	100%	83%	-	-	-	-	-	100%
026	Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian	Jumlah PNS yang mengikuti Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian	100%	92%	-	-	-	-	-	100%
028	Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan	Tersusunnya indikator kinerja aparatur	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
029	Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I STTD	Terpenuhinya calon taruna/i perhubungan darat	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
18	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI									
001	Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI	Terbinanya kegiatan olahraga bagi anggota KORPRI	80%	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80%
002	Pembinaan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI	Jumlah PNS yang mendapatkan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara	-	84%	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI	Jumlah PNS yang mendapatkan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara	80 orang	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80 orang
	Pembinaan Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al Qur'an Bagi anggota KORPRI	Terfasilitasinya penyelenggaraan MTQ KORPRI	90%	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90%
	Pembinaan Lembaga KORPRI	Terbinanya lembaga KORPRI Provinsi Aceh	90%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90%
	Persiapan dan pembinaan purna tugas anggota KORPRI	Persentase Anggota KORPRI yang mendapatkan persiapan dan pembinaan purna tugas	25%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2019	Realisasi Renja SKPA Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
21	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran									
001	Pelaksanaan MTQ		-	88%	-	-	-	-	-	45%
22	Program Pengembangan Sistim dan Teknologi Informasi Kepegawaian									
	Pengelolaan, penataan dossier kepegawaian bagi ASN	Jumlah dossier kepegawaian yang tertata dalam <i>roll pack</i> , terekam dalam <i>database</i> dan pemindahan	23000 record	100%	15.000 Arsip	15.000 Arsip	100%	31.482 Arsip	31.482 Arsip	23000 record
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Manajemen ASN Terintegrasi	Tersedianya Sistem informasi manajemen ASN terintegrasi	70%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70%
	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data PNS Pemerintah Aceh yang <i>terupdate</i> kedalam <i>database</i>	80%	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80%

Banda Aceh, 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731223 199311 1 001

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Pelaksanaan sumpah/janji ASN			400 PNS	400 PNS	400 PNS	400 PNS	399 PNS	400 PNS	100%	100%	
17	Persiapan dan Pembinaan Purna Tugas PNS			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
18	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) ASN			10.000 ASN	10.000 ASN	10.000 ASN	10.000 ASN	100%	100%	100%	100%	
19	Penataan Sistem Administrasi Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) ASN			200 PNS	200 PNS	200 PNS	200 PNS	100%	100%	100%	100%	
20	Proses Penyelesaian dan Penetapan Status Kepegawaian			100 PNS	100 PNS	100 PNS	100 PNS	100%	100%	100%	100%	
21	Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian			150 PNS	150 PNS	150 PNS	150 PNS	70%	70%	82%	82%	
22	Pembinaan, pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Aceh			80%	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	
23	Pengembangan Talent Pool ASN Pemerintah Aceh			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
VI	Program Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kepegawaian											
1	Penataan, Pengelolaan Dosier Kepegawaian bagi PNS			15.000 Arsip	31.482 Arsip	31.482 Arsip	36.204 Arsip	100%	100%	100%	100%	
2	Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
3	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
VII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI											
1	Pembinaan Lembaga Bapor KORPRI			2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
2	Pembinaan Penunjang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
3	Pembinaan Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al Qur'an Bagi anggota KORPRI			2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
4	Pembinaan Lembaga KORPRI			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
5	Persiapan dan pembinaan purna tugas anggota KORPRI			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

Banda Aceh, 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731223 199311 1 001

TABEL T-C. 31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPA Tahun 2021
PROVINSI ACEH

BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Lembar dari (halaman RKPA)

No	Kode	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting	
									Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	-2	(3)	(4)	(5)	(7)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							Rp 25,146,383,400		Rp 25,146,383,400	
1	001.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banda Aceh									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			100 %	Rp 7,524,869,000	100 %	Rp 7,524,869,000		
				Belanja Tambahan Penghasilan ASN			100 %	Rp 6,847,000,000	100 %	Rp 6,847,000,000		
				Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			100 %	Rp 332,904,000	100 %	Rp 332,904,000		
				Belanja Barang dan Jasa			100 %	Rp 46,800,000	100 %	Rp 46,800,000		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	Rp 2,177,870,000	100 %	Rp 2,177,870,000		
2	002.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banda Aceh									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Rp 93,911,110	12 Bulan	Rp 93,911,110		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Rp 3,353,888,149	12 Bulan	Rp 3,353,888,149		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp 447,461,623	12 Bulan	Rp 447,461,623		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Rp 182,096,376	12 Bulan	Rp 182,096,376		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Rp 24,120,000	12 Bulan	Rp 24,120,000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp 574,006,000	12 Bulan	Rp 574,006,000		

3	003.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh												
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	Bulan	Rp	30,000,000	12	Bulan	Rp	30,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	Bulan	Rp	684,000,000	12	Bulan	Rp	684,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	Bulan	Rp	247,846,259	12	Bulan	Rp	247,846,259	
4	004.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			12	Bulan	Rp	513,204,763	12	Bulan	Rp	513,204,763	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12	Bulan	Rp	1,108,072,945	12	Bulan	Rp	1,108,072,945	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12	Bulan	Rp	958,333,175	12	Bulan	Rp	958,333,175	
II	02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							Rp	6,765,880,000			Rp	6,765,880,000	
1	001.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Banda Aceh												
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			2	Kegiatan	Rp	702,879,817	2	Orang	Rp	702,879,817	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN													
				Pembinaan KORPRI dan Seleksi Pengurus KORPRI Teladan			12	Bulan	Rp	1,738,987,722	12	orang	Rp	1,738,987,722	
				Bapor			9	Cabang	Rp	135,257,800	9	8 Kab/ Kota Terintegrasi	Rp	135,257,800	
				HUT KORPRI			55	SKPA	Rp	67,571,897	55	15 Kab/ Kota Terintegrasi	Rp	67,571,897	
				Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI			20	ASN	Rp	205,981,703	20	Perangkat Lunak	Rp	205,981,703	

					Mental Rohani		8	Cabang	Rp	862,859,703	8	Perangkat Keras	Rp	862,859,703	
					Pembinaan Pra Purna Tugas KORPRI Gol I dan II		112	ASN	Rp	295,221,361	112	Instansi Vertikal	Rp	295,221,361	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	24000	Record	Rp	361,666,016	24000	Dokumen	Rp	361,666,016	
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	24000	Record	Rp	63,582,000	24000	Kab/ Kota	Rp	63,582,000	
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bulan	Rp	74,751,984	12	SKPA + Biro Setda + Cabdin Dinas Pendidikan	Rp	74,751,984	
2	002.	Mutasi dan Promosi ASN													
					Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	1700	ASN	Rp	215,824,393	24000	Record	Rp	215,824,393	
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
					Status Kepegawaian		150	ASN	Rp	41,683,072	150	ASN	Rp	41,683,072	
					Administrasi Kepegawaian		3000	ASN	Rp	63,978,753	3000	ASN	Rp	63,978,753	
					Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)		6000	ASN	Rp	261,814,721	6000	ASN	Rp	261,814,721	
					Penetapan Pensiun Otomatis (PPO)		650	ASN	Rp	117,963,732	650	ASN	Rp	117,963,732	
					Rapat Koordinasi di Bidang Kepegawaian		23	Kab/Kota	Rp	214,559,722	23	Kab/Kota	Rp	214,559,722	
					Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	2000	ASN	Rp	571,303,363	2000	ASN	Rp	571,303,363	
						Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah			ASN			ASN			
						Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah			ASN			ASN			
						Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah			Pejabat			Pejabat			
						Indek Profesional Pegawai (IPP)	73.30	%				73.30	%		
3	003.	Pengembangan Kompetensi ASN													
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	395	ASN	Rp	269,992,427	395	ASN	Rp	269,992,427	

4	004.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penguatan Tim Validasi dan Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja		30	SKPA	Rp	201,825,611	30	SKPA	Rp	201,825,611
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E Absensi Dan Simanja		165	SKPA	Rp	55,382,814	165	SKPA	Rp	55,382,814
				Pemetaan Jabatan dan Distribusi Tugas Jabatan Berbasis Anjab dan ABK		55	SKPA	Rp	73,785,000	55	SKPA	Rp	73,785,000
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		55	SKPA	Rp	50,000,000	55	SKPA	Rp	50,000,000
			Pembinaan Disiplin ASN	Sumpah/Janji PNS		500	ASN	Rp	25,710,299	500	ASN	Rp	25,710,299
				Majelis Kode Etik dan Sekretariat Kode Etik ANS		10	Kasus	Rp	18,404,683	10	Kasus	Rp	18,404,683
				Pokja LHKPN dan Sekretariat Pokja ASN		55	SKPA	Rp	11,717,584	55	SKPA	Rp	11,717,584
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		20	Kasus	Rp	63,173,823	20	Kasus	Rp	63,173,823
JUMLAH								Rp	31,912,263,400			Rp	31,912,263,400

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19731223 199311 1 001

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2021
PROVINSI ACEH

BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	N	N	N	

Banda Aceh, 2020
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19731223 199311 1 001

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 30,000,000			12 Bulan	Rp 45,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 684,000,000			12 Bulan	Rp 750,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 247,846,259			12 Bulan	Rp 300,000,000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 513,204,763			12 Bulan	Rp 550,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 1,108,072,945			12 Bulan	Rp 1,150,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 958,333,175			12 Bulan	Rp 960,000,000
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi										
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Banda Aceh	2 Kegiatan	Rp 702,879,817			2 Kegiatan	720,800,000
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Pembinaan KORPRI dan Seleksi Pengurus KORPRI Teladan		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 1,738,987,722			12 Bulan	1,800,000,000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
					Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Bapor		Banda Aceh	9	Cabang	Rp	135,257,800			9	Cabang	150,000,000
			HUT KORPRI		Banda Aceh	55	SKPA	Rp	67,571,897			55	SKPA	70,000,000
			Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI		Banda Aceh	20	ASN	Rp	205,981,703			20	ASN	225,000,000
			Mental Rohani		Banda Aceh	8	Cabang	Rp	862,859,703			8	Cabang	870,000,000
			Pembinaan Pra Purna Tugas KORPRI Gol I dan II		Banda Aceh	112	ASN	Rp	295,221,361			112	ASN	330,000,000
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Banda Aceh	24000	Record	Rp	361,666,016			24000	Record	380,000,000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian		Banda Aceh	24000	Record	Rp	63,582,000			24000	Record	68,000,000
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Banda Aceh	12	Bulan	Rp	74,751,984			12	Bulan	75,000,000
2	Mutasi dan Promosi ASN													
		Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN		Banda Aceh	1700	ASN	Rp	215,824,393			1700	ASN	250,000,000
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												
			Status Kepegawaian		Banda Aceh	150	ASN	Rp	41,683,072			150	ASN	50,000,000
			Administrasi Kepegawaian		Banda Aceh	3000	ASN	Rp	63,978,753			3000	ASN	73,000,000
			Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)		Banda Aceh	6000	ASN	Rp	261,814,721			6000	ASN	270,000,000
			Penetapan Pensiun Otomatis (PPO)		Banda Aceh	650	ASN	Rp	117,963,732			650	ASN	125,000,000
			Rapat Koordinasi di Bidang Kepegawaian		Banda Aceh	23	Kab/Kota	Rp	214,559,722			23	Kab/Kota	230,000,000
		Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN		Banda Aceh	2000	ASN	Rp	571,303,363			2000	ASN	580,000,000
			Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah				ASN						ASN	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah		ASN				ASN	
				Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah		Pejabat				Pejabat	
				Indek Profesional Pegawai (IPP)		73.30 %				81.20 %	
3	Pengembangan Kompetensi ASN										
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Banda Aceh	395 ASN	Rp 269,992,427			395 ASN	270,000,000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penguatan Tim Validasi dan Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja		Banda Aceh	30 SKPA	Rp 201,825,611			30 SKPA	220,000,000
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E Absensi Dan Simanja		Banda Aceh	165 SKPA	Rp 55,382,814			165 SKPA	60,000,000
			Pemetaan Jabatan dan Distribusi Tugas Jabatan Berbasis Anjab dan ABK		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 73,785,000			55 SKPA	85,000,000
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 50,000,000			55 SKPA	65,000,000
		Pembinaan Disiplin ASN	Sumpah/Janji PNS		Banda Aceh	500 ASN	Rp 25,710,299			500 ASN	30,000,000
			Majelis Kode Etik dan Sekretariat Kode Etik ANS		Banda Aceh	10 Kasus	Rp 18,404,683			10 Kasus	25,000,000
			Pokja LHKPN dan Sekretariat Pokja ASN		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 11,717,584			55 SKPA	12,500,000
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Banda Aceh	20 Kasus	Rp 63,173,823			20 Kasus	68,000,000
JUMLAH							Rp 31,912,263,400				Rp 33,418,467,620

Banda Aceh, 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731223 199311 1 001

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 30,000,000			12 Bulan	Rp 45,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 684,000,000			12 Bulan	Rp 750,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 247,846,259			12 Bulan	Rp 300,000,000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 513,204,763			12 Bulan	Rp 550,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 1,108,072,945			12 Bulan	Rp 1,150,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Banda Aceh	12 Bulan	Rp 958,333,175			12 Bulan	Rp 960,000,000
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Banda Aceh	2 Kegiatan	Rp 702,879,817			2 Kegiatan	720,800,000
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
		Pembinaan KORPRI dan Seleksi Pengurus KORPRI Teladan			Banda Aceh	12 Bulan	Rp 1,738,987,722			12 Bulan	1,800,000,000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021					Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022			
					Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Bapor		Banda Aceh	9	Cabang	Rp	135,257,800			9	Cabang	150,000,000
			HUT KORPRI		Banda Aceh	55	SKPA	Rp	67,571,897			55	SKPA	70,000,000
			Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI		Banda Aceh	20	ASN	Rp	205,981,703			20	ASN	225,000,000
			Mental Rohani		Banda Aceh	8	Cabang	Rp	862,859,703			8	Cabang	870,000,000
			Pembinaan Pra Purna Tugas KORPRI Gol I dan II		Banda Aceh	112	ASN	Rp	295,221,361			112	ASN	330,000,000
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Banda Aceh	24000	Record	Rp	361,666,016			24000	Record	380,000,000
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Banda Aceh	24000	Record	Rp	63,582,000			24000	Record	68,000,000
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Banda Aceh	12	Bulan	Rp	74,751,984			12	Bulan	75,000,000
2	Mutasi dan Promosi ASN													
			Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Banda Aceh	1700	ASN	Rp	215,824,393			1700	ASN	250,000,000
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
			Status Kepegawaian		Banda Aceh	150	ASN	Rp	41,683,072			150	ASN	50,000,000
			Administrasi Kepegawaian		Banda Aceh	3000	ASN	Rp	63,978,753			3000	ASN	73,000,000
			Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)		Banda Aceh	6000	ASN	Rp	261,814,721			6000	ASN	270,000,000
			Penetapan Pensiun Otomatis (PPO)		Banda Aceh	650	ASN	Rp	117,963,732			650	ASN	125,000,000
			Rapat Koordinasi di Bidang Kepegawaian		Banda Aceh	23	Kab/Kota	Rp	214,559,722			23	Kab/Kota	230,000,000
			Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Banda Aceh	2000	ASN	Rp	571,303,363			2000	ASN	580,000,000
				Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah			ASN						ASN	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rincian Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	RENCANA TAHUN 2021				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
					Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah		ASN				ASN	
				Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah		Pejabat				Pejabat	
				Indek Profesional Pegawai (IPP)		73.30 %				81.20 %	
3	Pengembangan Kompetensi ASN										
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN		Banda Aceh	395 ASN	Rp 269,992,427			395 ASN	270,000,000
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penguatan Tim Validasi dan Evaluasi Kinerja Dalam Pengelolaan Manajemen Kinerja		Banda Aceh	30 SKPA	Rp 201,825,611			30 SKPA	220,000,000
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E Absensi Dan Simanja		Banda Aceh	165 SKPA	Rp 55,382,814			165 SKPA	60,000,000
			Pemetaan Jabatan dan Distribusi Tugas Jabatan Berbasis Anjab dan ABK		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 73,785,000			55 SKPA	85,000,000
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 50,000,000			55 SKPA	65,000,000
		Pembinaan Disiplin ASN	Sumpah/Janji PNS		Banda Aceh	500 ASN	Rp 25,710,299			500 ASN	30,000,000
			Majelis Kode Etik dan Sekretariat Kode Etik ANS		Banda Aceh	10 Kasus	Rp 18,404,683			10 Kasus	25,000,000
			Pokja LHKPN dan Sekretariat Pokja ASN		Banda Aceh	55 SKPA	Rp 11,717,584			55 SKPA	12,500,000
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Banda Aceh	20 Kasus	Rp 63,173,823			20 Kasus	68,000,000
JUMLAH								Rp 31,912,263,400			Rp 33,418,467,620

Banda Aceh, 2020
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

Dr. ISKANDAR, A.P., S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731223 199311 1 001